

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama, sebuah tesis tentang *Social Business Model Canvas* pada PT. Citra Nusantara Mandiri yang ditulis oleh Mutiara Lubis tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bisnis sosial PT CNM dengan menggunakan teori *Social Business Model Canvas* dalam melaksanakan misi sosialnya. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Analisis data yang digunakan adalah analisa deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT CNM dengan kegiatan yang bercirikan *social entrepreneurship*, menjalankan perusahaan dengan prinsip-prinsip *social entrepreneurship* yaitu peduli, inovasi, kemitraan, sinergi, dimana tidak hanya berorientasi terhadap keuntungan semata tetapi hal ini juga mensejahterkan karyawan, petani serta masyarakat disekitar perusahaan. Nilai sosial yang ditawarkan (*value proposition*) PT CNM adalah proses pemberdayaan, dengan memberikan berbagai bantuan permodalan, memberikan pengetahuan dan menyerap tenaga kerja yang dapat menambah pendapatan masyarakat sekitar.

Penelitian kedua, tesis tentang Perencanaan Strategi Dalam Mediasi Pengaruh Faktor Manajerial Terhadap Kinerja UMKM *Handycraft* Kabupaten Bantul yang ditulis oleh Ferdinan J.M. tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh faktor manajerial terhadap kinerja UMKM dengan perencanaan strategi sebagai variabel mediasi pada UMKM di Kabupaten Bantul. Populasi pada penelitian ini adalah UMKM yang ada di

Kabupaten Bantul, pengambilan sampel menggunakan *cluster random sampling proporsional*. Metode analisis data meliputi analisis deskriptif dan analisis kuantitatif dengan teknik analisis menggunakan PLS (*Partial Least Square*). Temuan penelitian ini, yaitu: 1) faktor manajerial memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM; 2) faktor manajerial memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap perencanaan strategi; 3) perencanaan strategi memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM; 4) faktor manajerial memberikan pengaruh positif/signifikan terhadap kinerja UMKM yang dimediasi perencanaan strategi.

Penelitian ketiga, tesis tentang Analisis Perencanaan Partisipatif, Studi Kasus Di Kecamatan Pernalang Kabupaten Pernalang, yang ditulis oleh Agus Harto Wibowo tahun 2009. Penelitian ini bertujuan 1) Mendeskripsikan proses perencanaan partisipatif 2) Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses perencanaan partisipatif dan 3) Merancang model perencanaan partisipatif. Penelitian menjelaskan bahwa proses perencanaan partisipatif langkah-langkahnya meliputi penyelidikan, perumusan masalah, identifikasi daya dukung, Perumusan tujuan, menetapkan langkah-langkah rinci, dan merancang anggaran. Fokus penelitian ini adalah proses perencanaan partisipatif di Kecamatan Pernalang Kabupaten Pernalang dengan aspek-aspeknya penyelidikan, perumusan masalah, identifikasi daya dukung, Perumusan tujuan, menetapkan langkah-langkah rinci, dan merancang anggaran. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tujuan utama mendeskripsikan secara mendalam mengenai perencanaan Partisipatif di Kecamatan Pernalang Kabupaten Pernalang. Teknik

pengumpulan data dengan menggunakan wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data interaktif dari Miles dan Huberman yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan Penarikan kesimpulan.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, topik yang berhubungan dengan kewirausahaan sosial sangat berkembang. Kewirausahaan sosial adalah perusahaan profit dengan misi sosial. Oleh karena itu, kewirausahaan yang dituntut untuk harus mandiri secara ekonomi, membuat kewirausahaan mengadopsi pendekatan bisnis profit. Salah satu alat yang umum digunakan dalam konteks bisnis adalah *Business Canvas Model (BMC)*, model strategis manajemen yang dapat mengilustrasikan bagaimana organisasi menciptakan, memproduksi dan mendapatkan inovasi pada produk/layanan. Konsep *Business Canvas Model (BMC)* juga mulai dibutuhkan pada organisasi-organisasi yang bergerak di bidang sosial. Namun secara khusus, belum ada satupun penelitian yang mengadopsinya *Business Canvas Model (BMC)* ke dalam layanan kesejahteraan sosial dalam panti milik pemerintah.

Penelitian-penelitian terdahulu tentang *Business Model Canvas*, ataupun perencanaan pada organisasi profit maupun non-profit menghasilkan berbagai inovasi yang dapat meningkatkan kualitas layanan pada masing-masing organisasi. Salahsatu penelitian tersebut juga menghasilkan sebuah rekayasa *Business Model Canvas* pada bidang sosial yang disebut *Social Business Model Canvas*. Kebutuhan akan inovasi dan peningkatan kualitas layanan pada organisasi pelayanan kemanusiaan, diharapkan dapat juga diimplementasikan

melalui penelitian ini. Sebagai upaya menunjukkan adanya kebaruan (*novelty*) antara penelitian ini dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, maka peneliti berusaha untuk membandingkan, dan menjelaskan persamaan serta perbedaan berdasarkan ragam teori, metode penelitian, dan hasil penelitian yang sudah dilakukan berdasarkan tema model perencanaan organisasi.

Tabel 2.1.
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

NO.	JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	<i>Social Business Model Canvas</i> pada PT. Citra Nusantara Mandiri (Mutiar Lubis, 2018)	<ul style="list-style-type: none"> a. menggunakan konsep <i>Business Model Canvas</i>; b. menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi kasus; c. menghasilkan <i>value proposition</i> organisasi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. menggunakan teori <i>Business Model Canvas</i> yang telah modifikasi; b. Metode penelitian kualitatif dengan <i>Action Research</i>; c. menghasilkan model perencanaan .
2.	Perencanaan Strategi Dalam Mediasi Pengaruh Faktor Manajerial Terhadap Kinerja UMKM <i>Handycraft</i> Kabupaten Bantul (Ferdinan J.M, 2019)	<ul style="list-style-type: none"> a. membahas topik perencanaan dalam manajemen strategi b. menggunakan metode penelitian kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> a. menghasilkan sebuah model perencanaan yang dapat dijadikan contoh bagi UPT di seluruh Indonesia b. menghasilkan alternatif perencanaan dan pengembangan organisasi melalui rekayasa model.
3.	Analisis Perencanaan Partisipatif (Studi Kasus Di Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang) (Agus Harto Wibowo, 2009)	<ul style="list-style-type: none"> a. menggunakan teori perencanaan partisipatif; b. menggunakan metode penelitian kualitatif dengan <i>indepth interview</i>; c. menghasilkan sebuah analisis perencanaan pada 	<ul style="list-style-type: none"> a. menggunakan model perencanaan <i>Social Program Canvas</i>; b. Metode penelitian kualitatif dengan <i>Participatory Action Research</i>; c. Menghasilkan nilai tambah (<i>value added</i>) pada organisasi berdasarkan standar pelayanan minimal

		lembaga milik pemerintah	dan panduan layanan publik lembaga pemerintah
--	--	--------------------------	---

Sumber: Penelitian Pascasarjana Poltekesos Bandung 2023

Secara signifikan penelitian yang dilakukan peneliti berbeda dengan 3 (tiga) penelitian yang disebutkan di atas, hal ini berdasar pada implementasi sebuah model baru yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi sebuah organisasi agar dapat mencapai tujuannya di bidang kesejahteraan sosial. Selain itu dalam penelitian ini, peneliti menekankan pada bagaimana peran seluruh elemen dalam organisasi dapat menghasilkan sebuah program yang baik dari proses penyusunan perencanaan yang kolaboratif. *Novelty* lainnya dalam penelitian ini adalah adanya sebuah rekayasa model yang diadopsi dari *Business Canvas Model (BMC)*, dan diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas perencanaan untuk dapat mencapai tujuan organisasi.

2.2 Kajian yang Relevan dengan Penelitian

2.2.1 Kajian tentang Manajemen Organisasi Pelayanan Kemanusiaan

Terry dalam Sukarna (2011) menyampaikan bahwa “Manajemen merupakan sebuah proses yang khas, terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain. Sumber-sumber yang dimanfaatkan dalam manajemen sendiri biasanya berisikan 6 (enam) indikator, yang terdiri dari sumber daya manusia (*man*), bahan (*material*), alat (*machine*), teknologi (*method*), finansial (*money*), dan sasaran (*market*).”

Manajemen adalah ilmu yang berguna untuk mengelola suatu aktifitas untuk mencapai suatu tujuan yang dilakukan dengan bekerjasama secara efisien dan terencana dengan baik. Manajemen dapat disebut juga sebagai proses yang dilakukan dalam bentuk kerjasama dan pengembangan sumber daya manusia, untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam suatu organisasi.

Djulaiha Sukmana (2023) menyampaikan bahwa “Pengembangan sumber daya manusia melalui program pendidikan dan pelatihan serta peningkatan pengetahuan akan dapat mengoptimalkan potensi individu/SDM pada organisasi pelayanan sosial.” Secara umum, manajemen dapat disebut sebagai sebuah proses melalui beberapa tahapan untuk pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.

Manajemen organisasi pelayanan sosial merupakan suatu proses kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan dalam bidang sosial dengan menggunakan sumber daya yang terdapat di lingkungan masyarakat secara efisien dan efektif. Dalam *setting* pekerjaan sosial berarti bahwa para pekerja sosial yang berfungsi sebagai manajer berupaya untuk membangun dan mencapai suatu lingkungan kerja yang optimal yang kondusif bagi efisiensi penyediaan pelayanan yang efektif bagi klien. Dengan demikian pemahaman tentang manajemen dari suatu organisasi pelayanan menjadi begitu penting, dalam rangka mencapai efektifitas pelayanan sosial yang diberikan.

Definisi manajemen organisasi pelayanan kemanusiaan dipahami dari definisi organisasi pelayanan kemanusiaan dan manajemen. Organisasi diartikan sebagai suatu kesatuan dari kumpulan orang-orang yang saling tergantung dan

bekerjasama, melakukan aktivitas-aktivitas secara sistematis, teratur, terkoordinasi, terkendali dan dipimpin yang berfungsi untuk mencapai tujuan tertentu. Netting (2012) mendefinisikan organisasi sebagai “Kumpulan individu-individu yang bersama-sama mencapai suatu tujuan tertentu. Organisasi ada untuk menyelesaikan tugas yang tidak dapat diselesaikan dengan baik oleh perseorangan.”

Organisasi pelayanan kemanusiaan didefinisikan sebagai suatu organisasi yang memiliki fungsi utama untuk memberikan pelayanan kepada orang-orang, baik secara individual maupun kolektif, untuk memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesejahteraan sosial mereka. Donovan (1991) mendefinisikan organisasi pelayanan kemanusiaan sebagai “Organisasi yang produk utamanya adalah pelayanan yang dirancang untuk mengoptimalkan kesejahteraan kliennya. Organisasi pelayanan manusia, secara mendasar memiliki fungsi untuk melindungi, memelihara, atau meningkatkan kesejahteraan individu-individu melalui pemahaman, pembentukan, atau perubahan atribut personal.”

Organisasi pelayanan kemanusiaan memiliki karakteristik yang membedakannya dengan tipe organisasi lainnya. Di bawah ini disampaikan karakteristik organisasi pelayanan kemanusiaan:

1. Tujuannya memenuhi kebutuhan masyarakat;
2. Berdasar pada nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat;
3. Berkomitmen melindungi dan meningkatkan kesejahteraan orang-orang yang dilayani dan masyarakat pada umumnya;
4. Mendapat mandat dan sumber daya dari semua atau sebagian pemerintah yang berkaitan melalui peraturan perundang-undangan atau donasi, dan dioperasikan bukan untuk tujuan profit;
5. Dipertanggungjawabkan kepada semua atau sebagian pemerintah yang berkaitan, juga kepada pengguna layanan;

6. Akses dan pemanfaatan pelayanan sangat dikendalikan oleh penyedia layanan daripada pengguna layanan;
7. Pelayanannya dijalankan dengan metode-metode yang tidak tetap;
8. Hasil pelayanannya tidak pasti dan tidak dapat diprediksi;
9. Pelayanan disediakan dalam relasi staff dengan klien dalam struktur yang formal. (Donovan, 1991, hal. 46)

Kinerja organisasi pelayanan kemanusiaan dinilai dari keberlanjutan dan kualitas pelayanan pada mereka yang membutuhkan pelayanan. *Human Services Organization* sebagai salah satu macam organisasi formal adalah suatu organisasi dimana produk utamanya adalah jasa pelayanan bagi orang-orang yang membutuhkan khususnya bidang kesejahteraan sosial. Djulaiha Sukmana (2023) menyampaikan bahwa “Organisasi pelayanan sosial erat kaitannya dengan kesejahteraan sosial karena jenis organisasi ini menyelenggarakan kegiatan pelayanan terhadap masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial. Organisasi pelayanan sosial adalah suatu lembaga sosial yang beraktifitas atau berperan penting dalam mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusinya dalam pemecahan masalah yang dihadapi oleh setiap individu, kelompok, maupun masyarakat.

Netting (2012) menyampaikan bahwa “Organisasi pelayanan sosial harus dikelola secara profesional agar dapat memberikan pelayanan yang optimal, untuk itu diperlukan para ahli serta pengelola organisasi yang paham dalam menjalankan roda kegiatan suatu organisasi, hal ini berkaitan dengan komponen-komponen yang membangun organisasi tersebut.” Pengertian tersebut penguatan dan pemahaman, bahwa salah satu ciri dari organisasi pelayanan kemanusiaan adalah memiliki produk layanan yang dapat bermanfaat bagi kemanusiaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa lokasi penelitian yaitu pusat pelayanan sosial karya wanita

(PPSKW) *Mattiro Deceng* merupakan salah satu organisasi pelayanan kemanusiaan.

2.2.2 Kajian tentang Perencanaan Program Sosial

Krisnandi (2019) menyampaikan bahwa “Perencanaan yang dilakukan haruslah mengikuti tujuan dan hasil yang diinginkan oleh suatu organisasi atau pihak yang merencanakan”. Serangkaian tindakan yang direncanakan tentunya haruslah berdasarkan tujuan dari organisasi tersebut. Perencanaan pada sebuah organisasi diartikan sebagai pemilihan tujuan dan menentukan bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut yang berdasar pada nilai-nilai yang dianut oleh organisasi.

Pramularso (2022) menyampaikan bahwa “Perencanaan adalah dokumen tertulis yang disiapkan untuk menggambarkan semua unsur-unsur yang relevan baik internal, maupun eksternal untuk memulai sesuatu.” Perencanaan diartikan sebagai suatu proses untuk menetapkan tujuan dan sasaran, menentukan pilihan-pilihan dari tindakan yang akan dilakukan dan diakhir dengan kajian cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Perencanaan program pelayanan disusun berdasarkan hasil asesmen, kualitas hasil asesmen yang dilakukan menentukan kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan dipengaruhi kesesuaian penetapan rencana. Penyusunan rencana program pelayanan perlu menetapkan kebutuhan, tujuan, indikator, kegiatan dan pendayagunaan sumber. Penyusunan rencana program pelayanan juga merupakan

bagian dari proses pemecahan masalah. Penyusunan rencana juga merupakan pilihan rasional dan melibatkan penilaian mengenai beberapa kemungkinan. Proses merencanakan adalah sebuah keterampilan. Oleh sebab itu pekerja sosial dalam menyusun rencana harus sensitif dengan latar belakang penerima manfaat. Perencanaan juga dapat memiliki kandungan arti yang berbeda, namun secara umum perencanaan atau *planning* terdiri dari:

1. **Proses.** Yaitu suatu konsep dasar yang menjelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan berjalan sesuai dengan tahap-tahap yang ditentukan. Dalam hal ini kegiatan dalam perencanaan dilakukan menurut proses yang berlaku.
2. **Penetapan tujuan dan sasaran.** Yaitu kegiatan merencanakan ke arah mana organisasi dapat menetapkan tujuannya secara khusus ataupun umum, tujuan jangka panjang maupun tujuan jangka pendek.
3. **Pemilihan tindakan.** Yaitu organisasi harus mengoptimalkan pada beberapa tindakan yang efektif ketimbang harus menggunakan semua tindakan yang kadang kala tidak efektif.
4. **Mengkaji terbaik.** Walaupun pilihan tindakan sudah dianggap baik namun bisa saja tetap tidak efektif kalau dilakukan dengan cara-cara kurang baik. Sebaliknya, sesuatu yang baik apabila dilakukan dengan cara-cara yang baik pula maka menghasilkan sesuatu yang efektif.
5. **Tujuan.** Hal ini menyangkut hasil akhir atau sasaran khusus yang diinginkan oleh organisasi. Keinginan itu bisa dinyatakan dalam suatu standar-standar yang berlaku baik kualitatif maupun kuantitatif. (Griffin, 2015, hal. 22)

Pada dasarnya perencanaan adalah kebutuhan untuk memberikan jawaban atas 6 (enam) pertanyaan-pertanyaan, dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan sebuah kegiatan/program. Pertanyaan-pertanyaan tersebut terdiri dari apakah (*what*) siapa (*Who*) kapan (*When*) di mana (*Where*) mengapa (*why*) dan bagaimana (*How*) sebagai unsur-unsur perencanaan.

1. *What*: tindakan apakah yang harus dikerjakan? Dalam hal ini haruslah dijelaskan dan diperinci aktivitas yang diperlukan, faktor-faktor yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut agar tujuan yang dimaksud dapat tercapai.

2. *Why*: apakah sebabnya tindakan itu dikerjakan? Di sini perlu diperlukan penjelasan dan ketegasan mengapa kegiatan itu harus dikerjakan dan mengapa tujuan itu harus dicapai.
3. *Where*: di mana tindakan itu harus dilaksanakan? Dalam *planning* harus memuat di mana lokasi kegiatan tersebut diselesaikan. Hal ini diperlukan untuk menyediakan sarana dan fasilitas untuk mengerjakan kegiatan tersebut.
4. *When*: kapan tindakan itu harus dilaksanakan? Hal ini diperlukan adanya jadwal waktu dan kapan dimulainya kegiatan hingga berakhirnya kegiatan tersebut.
5. *Who*: siapa yang harus melakukan tindakan itu? Dalam *planning* harus memuat tentang para pekerja yang mengerjakan kegiatan tersebut. Di samping itu juga diperlukan kejelasan wewenang dan tanggung jawab para pekerja.
6. *How*: bagaimana melaksanakan tindakan itu? Dalam *planning* harus dijelaskan teknik, metode, dan sistem mengerjakan pekerjaan yang dimaksud (Sadikin, 2020, hal. 214)

Organisasi perlu meningkatkan kualitas penerapan fungsi manajemennya, sebagai upaya pencapaian tujuan yang dikehendaki. Sebagai salah satu fungsi manajemen, perencanaan berperan penting karena menjadi pondasi bagi pelaksanaan fungsi manajemen lainnya untuk mencapai tujuan. Fungsi manajemen lainnya hanya menjalankan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam fungsi perencanaan itu sendiri. Penetapan tujuan rencana pelayanan perlu berpegang pada prinsip *SMART*, yaitu: tujuan harus bersifat khusus, spesifik (*specific*); tujuan tersebut harus terukur (*measurement*); tujuan tersebut harus mungkin dan dapat dicapai (*achievable*); tujuan tersebut harus realistis, rasional dan logis (*realistic*); tujuan harus mempunyai rentang waktu untuk dicapai (*timely*).

Indikator keberhasilan harus dapat diukur, dan seringkali perubahan-perubahan yang terjadi dapat dianggap sebagai ukuran keberhasilan. Indikator dapat menggambarkan pencapaian tujuan dalam jangka pendek, menengah,

maupun jangka panjang, seperti yang dirumuskan dalam tujuan (*goals*), tentang dampak positif maupun negatif. Indikator ini dapat diketahui, jika pengukuran dilakukan secara terus menerus dalam jangka waktu yang cukup lama setelah rencana pelayanan sosial dilaksanakan.

Sadikin (2020) menyatakan “banyak faktor yang mempengaruhi pentingnya pembuatan suatu perencanaan antara lain: perubahan ekonomi, kemajuan teknologi, perubahan iklim, perubahan selera konsumen, gejolak politik, dan sistem keamanan yang tidak terjamin memberikan banyak tantangan yang harus dihadapi walaupun penuh dengan resiko.” Pentingnya penyusunan perencanaan mendorong organisasi pelayanan kemanusiaan menyusun sebuah perencanaan untuk memaksimalkan pelayanan yang diberikan. Pengaruh dari berbagai hal membuat perencanaan memiliki manfaat, kelemahan dan kelebihan. Hal ini perlu dipahami oleh pimpinan agar bisa lebih hati-hati dalam menyusun sebuah perencanaan.

Manfaat atau kegunaan dibuatnya perencanaan:

1. Menciptakan arah/fokus dan tujuan perusahaan;
2. Menjadi pedoman ataupun standar bagi upaya pengurangan ketidakpastian;
3. Perencanaan menimbulkan aktivitas-aktivitas yang teratur;
4. Menjadi alat pengawasan;
5. Merangsang prestasi.

Kelemahan atau keterbatasan perencanaan:

1. Perencanaan biasanya memerlukan biaya yang besar;
2. Perencanaan terkadang menghambat kreativitas;
3. Perencanaan membutuhkan waktu yang lama;
4. Perencanaan terkadang mempunyai nilai praktis yang terbatas.

(Krisnandi, 2019, hal. 106)

Pendekatan Perencanaan adalah sudut pandang yang kita gunakan dalam proses penetapan tujuan dan unsur perencanaan lainnya agar perencanaan tersebut dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Macam pendekatan perencanaan:

1. **Bottom up approach.**
Pendekatan ini dilakukan dengan menyerap data dan informasi dari struktur paling bawah organisasi kemudian dirumuskan oleh pimpinan menjadi sebuah rencana utuh. Pendekatan ini menaruh perhatian khusus kepada para anggota organisasi yang lebih banyak mengetahui kondisi kerja di lapangan.
2. **Top down approach.**
Pada perencanaan *top-down*, *top manager* menentukan tujuan secara luas dan mendelegasikan manajer tingkat bawah untuk menyusun rencana dengan batasan tersebut. Pendekatan Ini adalah kebalikan dari *bottom up approach*, yaitu pimpinan organisasi yang terlebih dulu merumuskan rencana kemudian dipaparkan kepada anggota di bawah kepemimpinannya.
3. **Interactive approach.**
Kondisi *interactive approach* ini adalah penyusunan rencana yang dilakukan secara bersamaan oleh pimpinan dan anggota organisasi. Mereka duduk bersama dalam satu forum untuk membahas secara rinci rumusan rencana yang ditetapkan. Namun pada organisasi besar, pendekatan ini dilakukan dengan menetapkan perwakilan dari anggota yang representatif untuk merumuskan rencana bersama pimpinan.
4. **Dual-level approach.**
Maksud dari pendekatan ini adalah pimpinan dan anggota menyusun rumusan rencana mereka masing-masing kemudian disatukan menjadi rencana utuh. Pimpinan menyusun rencananya sendiri, begitu juga dengan anggota. Mereka bertemu pada satu forum untuk menyatukan rumusan perencanaan. Pendekatan ini cenderung berisiko benturan pemikiran antara pimpinan dan anggota.
5. **Perencanaan inside-out dan perencanaan outside-in.**
Perencanaan *inside-out* ialah perencanaan yang berfokus ke hal yang sudah dilakukan, tetapi dengan terus berupaya untuk melakukan hal terbaik. Tujuannya ialah meningkatkan efektivitas organisasi dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. Di lain sisi, perencanaan *outside-in* berupaya menganalisis lingkungan eksternal dan menyusun rencana pengeksplorasian peluang dan minimalisasi masalah.
6. **Perencanaan Situasional/Contingency.**
Perencanaan *contingency* mencakup perencanaan alternatif yang menimbulkan implementasi yang pada saat perencanaan awal menjadi tidak sesuai karena adanya perubahan kondisi. Fokus utamanya ialah

menentukan sedini mungkin berbagai perubahan yang mungkin terjadi di peristiwa mendatang yang bisa berdampak bagi pelaksanaan perencanaan. Pendekatan ini berupaya untuk senantiasa melakukan penyesuaian terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal. Dalam hal ini, perencanaan yang efektif ialah perencanaan yang sesuai dengan situasi yang dihadapi organisasi (Krisnandi, 2019, hal. 103)

Program adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dengan harapan mendatangkan hasil atau pengaruh. Hasibuan (2004) mengungkapkan bahwa “Program adalah suatu jenis rencana yang jelas dan konkret karena di dalamnya sudah tercantum sasaran, kebijaksanaan, prosedur, anggaran, dan waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan.” Selain itu, definisi program juga termuat dalam Undang-Undang RI. Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa: “Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi masyarakat.”

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dalam proses pelaksanaan suatu program sesungguhnya dapat berhasil, kurang berhasil, ataupun gagal sama-sekali apabila ditinjau dari wujud hasil yang dicapai atau *outcomes*. Karena dalam proses tersebut turut terlihat berbagai unsur yang pengaruhnya bersifat mendukung maupun menghambat pencapaian sasaran suatu program., maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan program sosial adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok berbentuk pelaksanaan kegiatan yang didukung kebijaksanaan, prosedur, dan sumber daya dimaksudkan

membawa suatu hasil untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan berdampak pada masyarakat.

Perencanaan atau *planning* merupakan salah satu fungsi/sarana manajemen yang krusial, karena berkaitan dengan tahapan awal untuk menentukan keberhasilan pengelolaan bisnis maupun tujuan lainnya dari suatu organisasi atau perusahaan. Fungsi perencanaan atau *planning function* berurusan langsung dengan penetapan sasaran dan tujuan yang menentukan pilihan, keputusan, dan pengkajian berbagai tindakan yang dilakukan pada suatu penyelenggaraan manajemen.

Setiap organisasi menerapkan suatu model perencanaan strategis sesuai dengan karakteristik organisasi tersebut. Menurut Texas Workforce Commission, (2005) beberapa alternatif model dari perencanaan strategis, yaitu:

1. Perencanaan Strategis Dasar (*Basic Strategic Planning*), yaitu sebuah perencanaan strategis yang terdiri dari langkah-langkah berikut, yaitu: (a) mengidentifikasi tujuan organisasi; (b) memilih tujuan; (c) mengidentifikasi strategi implementasi yang spesifik; (d) mengidentifikasi rencana aksi (*action plans*) untuk mengimplementasikan setiap strategi; serta (e) memantau dan memperbaharui rencana.
2. Perencanaan Skenario (*Scenario Planning*), yaitu perencanaan yang bukan memprediksi masa depan, tetapi tentang bagaimana sebuah keputusan yang tepat bisa dilakukan saat ini. Kita tidak mampu memprediksi segala hal terkait dengan masa depan, kita hanya berusaha menghadirkan masa depan dari sudut pandang saat ini sehingga kita bisa melakukan antisipasi terhadap segala hal

yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, kita memerlukan suatu perencanaan scenario untuk menggambarkan situasi di masa depan dalam situasi sekarang.

Adapun langkah-langkah dari perencanaan scenario adalah:

- a. Mengidentifikasi beberapa kekuatan eksternal yang penting dan memproyeksikan pengaruhnya terhadap organisasi;
 - b. Membahas tiga skenario masa depan yang berbeda untuk setiap perubahan dari kekuatan eksternal, dan meninjau skenario terburuk;
 - c. Menyarankan strategi yang potensial untuk menanggapi perubahan dari masing-masing skenario;
 - d. Mendeteksi pertimbangan umum dalam strategi; serta
 - e. Memilih perubahan eksternal yang paling mungkin dan mengidentifikasi strategi yang paling responsif.
3. Perencanaan Penyelarasan (*Alignment Planning*), adalah model yang dapat digunakan untuk organisasi yang perlu menyempurnakan strategi mereka atau isu-isu yang dialami terkait efisiensi internal. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan misi organisasi dan sumber daya agar lebih efektif. Berikut ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan, yaitu:
- a. Menggaris bawahi misi, program, sumber daya, dan dukungan yang diperlukan;
 - b. Mengidentifikasi apa sudah berjalan dengan baik dan apa yang perlu penyesuaian;
 - c. Mengidentifikasi bagaimana melakukan penyesuaian; serta
 - d. Menyertakan penyesuaian dalam rencana strategis.

4. Perencanaan Berbasis Isu (*Issues Based Planning*), Organisasi yang sudah besar dan berpengalaman biasanya menggunakan model yang lebih komprehensif dan efektif. Berikut langkah-langkahnya, yaitu:
 - a. melakukan penilaian eksternal / internal;
 - b. merancang strategi utama untuk mengatasi masalah dan tujuan;
 - c. mengembangkan atau memperbarui visi, misi, nilai-nilai;
 - d. menetapkan rencana aksi;
 - e. merekam penilaian, tujuan, dan strategi, misi, visi, dan rencana aksi dalam dokumen Rencana Strategis;
 - f. mengembangkan dokumen rencana operasional tahunan;
 - g. mengembangkan rencana anggaran tahunan;
 - h. menjalankan program dan kegiatan tahunan; serta
 - i. pemantauan/meninjau/mengevaluasi/memperbarui dokumen Rencana Strategis.
5. Perencanaan Pengorganisasian Diri (*Self-Organizing Planning*), yaitu sebuah proses linear yang berjalan dengan proses yang lebih alami. Perlu ada proses refleksi bersama terhadap proses dan system melalui dialog, eksplorasi, dan teknik *storyboard*. Berikut adalah langkah-langkahnya, yaitu:
 - a. Memperjelas dan mengartikulasikan nilai-nilai budaya organisasi;
 - b. Mengartikulasikan visi kelompok;
 - c. Melakukan dialog berkala (kuartalan) tentang apa yang dibutuhkan organisasi membutuhkan untuk mencapai visi dan memutuskan apa yang akan dilakukan berikutnya;

- d. Berfokus pada proses belajar daripada metode linier;
 - e. Menumbuhkan kesabaran untuk proses-proses yang sedang berlangsung;
 - f. Memutuskan bagaimana menggambarkan rencana strategis kepada para pemangku kepentingan.
6. Perencanaan Terpadu (*Hibrid-Integrated Planning*), secara teori perencanaan ini menggabungkan proses dari dua atau lebih model yang menghasilkan efek hibrida. Salah satu contoh adalah model *Balanced Score Card* (BSC), yang mengintegrasikan unsur proses perencanaan berbasis isu-isu dan keselarasan. Model BSC mengarahkan fokus strategis organisasi terhadap faktor-faktor kunci kesuksesan organisasi. Manajemen strategis menerjemahkan ukuran kinerja dan target ke dalam inisiatif tindakan.

Untuk melakukan perencanaan strategis perlu diperhatikan hal-hal berikut, yaitu: (1) membentuk tim perencanaan; (2) mendiskusikan model perencanaan yang akan diadopsi; (3) memastikan setiap anggota tim memahami proses dan hasil yang diharapkan; (4) menyediakan waktu yang cukup untuk proses perencanaan; (5) mendiskusikan misi lembaga dan kontribusi setiap anggota untuk itu; serta (6) membangun dasar informasi untuk memberikan hasil dan output yang spesifik.

Secara umum langkah-langkah perencanaan strategis terdiri dari 4 (empat) tahap, yaitu: (1) menganalisis; (2) merencanakan; (3) mengimplementasikan; serta (4) mengukur. Tahapan ini dimulai dari penentuan visi organisasi sampai hasil yang diperoleh.

Perencanaan strategis bisa lebih berbobot, jika memperhatikan pertanyaan-pertanyaan berikut: Apakah tujuan (organisasi) kita ini ada? Siapa pelanggan dan stakeholder?, Apa kekuatan dan kelemahan (organisasi) kita? Apa tren yang mempengaruhi lingkungan kerja (organisasi) kita? Faktor-faktor yang penting bagi keberhasilan (organisasi) kita? Apa keputusan kebijakan mendasar yang harus dibuat (organisasi) kita? Apa nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang membimbing keputusan (organisasi) kita? Tindakan apa yang diperlukan untuk melaksanakan keputusan (organisasi) kita? Apa yang menjadi prioritas kita, sumber daya apa yang akan (organisasi) kita butuhkan? Apa yang akan menjadi dampak pada kelompok sasaran (organisasi) kita atau pelanggan? Bagaimana kita akan tahu bahwa itu berharga? Bagaimana kita akan menganalisis dan menjelaskan bahwa (organisasi) kita berada pada atau keluar jalur? Bagaimana kita akan melakukan koreksi yang diperlukan selama pelaksanaan?.

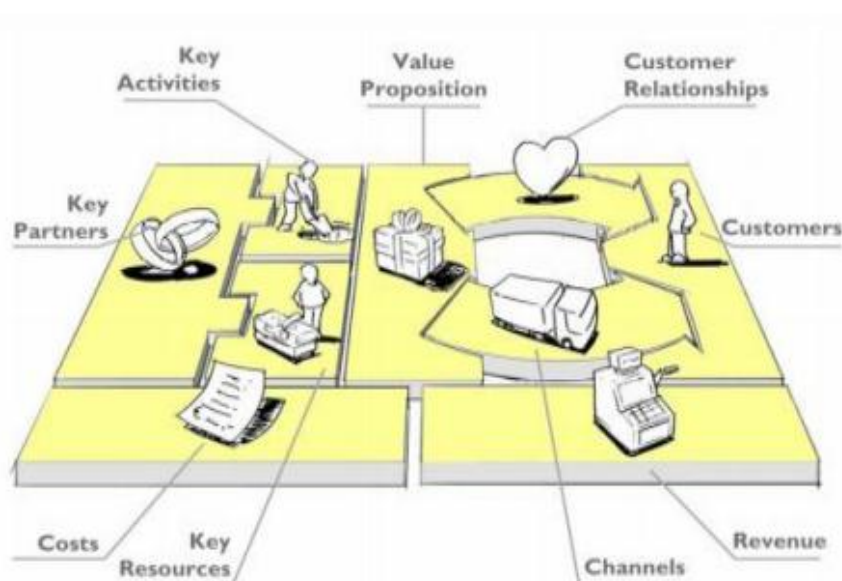
2.2.3 Kajian tentang Kanvas Program Sosial

Model bisnis merupakan gambaran kerangka kerja yang penting bagi sebuah organisasi atau perusahaan untuk menentukan tujuan dari perusahaan, melihat kelebihan dan kekurangan dari perusahaan, serta memberikan sebuah nilai kepada *customer* agar perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan yang optimal. Metode ini digunakan untuk bisa mendapatkan pelanggan, bagaimana memberikan pelayanan kepada pelanggan, dan tentunya bagaimana perusahaan menghasilkan uang.

Pigneur & Osterwalder (2012) menyatakan bahwa “Lingkungan model bisnis adalah sebuah gambaran mengenai tentang bagaimana sebuah perusahaan

atau organisasi dapat memahami lingkungan internal dari sebuah perusahaan agar membantu model bisnis dari perusahaan yang dijalankan serta beradaptasi menjadi lebih efektif untuk menggeser kekuatan yang ada di lingkungan eksternal perusahaan.” Untuk mendapatkan model bisnis yang lebih kuat dan kompetitif, diperlukan lingkungan yang lebih spesifik dalam menjalankan model bisnis yang dijalankan sehingga pemahaman yang didapatkan menjadi lebih baik.

Pigneur & Osterwalder (2012) memperkuat tentang model bisnis, menyatakan bahwa “Model bisnis merupakan gambaran dasar bagaimana sebuah organisasi untuk menciptakan, menghantarkan, dan menangkap sebuah nilai. Model bisnis juga dapat diartikan sebagai suatu formula untuk mendapatkan *profit* yang maksimal.” *Business Model Canvas* atau biasa disebut dengan BMC adalah salah satu alat strategi yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah model bisnis dan menggambarkan dasar pemikiran tentang bagaimana organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai. *Business Model Canvas* (BMC) merupakan model/alat untuk memvisualisasikan, menggambarkan, menilai, maupun mengubah suatu model bisnis.



Gambar 2.2: Skema *Business Model Canvas* (Pigneur: 2012)

Dalam bukunya yang berjudul “*Business Model Generation*” Pigneur & Osterwalder (2012) membuat suatu kerangka *Business Model* yang berbentuk kanvas dan terdiri dari 9 kotak yang saling berkaitan. Kotak-kotak itu berisikan elemen-elemen yang penting yang menggambarkan bagaimana organisasi menciptakan dan mendapatkan manfaat bagi pelanggan dan dari para pelanggannya. Manfaat dari *Business Model Canvas* bisa menjabarkan, menganalisis, dan merancang secara kreatif dan inovatif dalam upaya membentuk, memberikan, dan menangkap dimensi pasar dan mendorong permintaan dengan menginovasi sebuah nilai. *Business Model Canvas* ini dipaparkan secara visual berupa suatu kanvas/gambar sehingga membantu memudahkan untuk dipahami oleh sang pembaca. Pihak stakeholder perusahaan bisa menyesuaikan bentuk *Business Model Canvas* ini sesuai dengan kebutuhan usahanya.

Rinjany (2022) menyampaikan bahwa “*Business Model Canvas* merupakan metode yang menggambarkan model bisnis secara menyeluruh. Pada pemetaannya *business model canvas* terdiri dari sembilan blok utama yaitu *customer segments, value proposition, customer relationship, channels, key activities, key partnership, key resources, cost structure dan revenue streams*. Sembilan kolom utama ini mendefinisikan kondisi usaha baik dari dalam maupun dari lingkungan bisnis. Pemetaan model bisnis dengan *business model canvas* ini dapat menjadi evaluasi bagi organisasi.”

Social Business Model Canvas adalah sebuah teknik yang digunakan untuk menggambarkan model bisnis sosial secara visual. Teknik ini diadaptasi dari *business model canvas* yang dikembangkan pertama kali oleh Alexander Osterwalder. Osterwalder bersama dengan Pigneur membuat sebuah pendekatan model kanvas yang terdiri dari 9 kotak untuk memudahkan pebisnis untuk membangun dan mengembangkan bisnisnya. Sembilan kotak itu adalah: *value proposition*, *customer segment*, *channels*, *customer relationship*, *key activities*, *key resources*, *key partnership*, *revenue stream*, dan *cost structure*. Namun jika disesuaikan dengan konsep perusahaan sosial, perlu ditambahkan 3 kotak/kolom tambahan yaitu *mission*, *social innovation*, dan *community reinvestment*.

SOCIAL BUSINESS MODEL CANVAS

MISSION: Mengembangkan sumber daya desa melalui makanan dan pertanian dengan berkolaborasi dengan petani local serta menerapkan prinsip pertanian berkelanjutan.			
IMPLEMENTATION (Create Value)		VALUE	MARKET (Deliver Value)
Key Allies	Key Resources	Social Innovation	Customer Relationships
<ul style="list-style-type: none"> Berbagai mitra pendamping petani seperti: <ul style="list-style-type: none"> Yayasan Kerabat Desa Kota Yayasan Bina Desa Sekolah Tani Muda Kelompok Tani Dan lain-lain Berbagai mitra penyandang dana: <ul style="list-style-type: none"> Australian Government Pemerintah Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Bibit tanaman Lahan pertanian Pengetahuan & teknologi pertanian Sumber daya manusia (petani & pengolah produk Agradaya) Hak paten/lisensi Merek Pendanaan 	<ul style="list-style-type: none"> Memotong rantai produksi produk rempah untuk kesejahteraan petani dengan konsep fair-price & fair-trade. 	<ul style="list-style-type: none"> Business-to-business Business-to-consumer
	Key Activities	Value Proposition	Customer Segments
	<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan relasi dengan petani Pengembangan kemitraan Riset dan pengembangan produk Mencari potensi pasar baru Mencari solusi permasalahan pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> Produk olahan rempah berkualitas & organik Produk bernilai sosial Praktik pertanian berkelanjutan Inovasi produk makanan dan pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> Purchaser: Donatur, investor User: konsumen produk makanan/minuman, pecinta gaya hidup sehat/organik Stakeholder: pemerintah, masyarakat, petani
FINANCES			
Cost of Delivery		Community Reinvestment	Revenue Streams
<ul style="list-style-type: none"> Modal kerja untuk perawatan dan pengelolaan pertanian Biaya riset dan pengembangan teknologi Biaya pemasaran Biaya sumber daya manusia Biaya operasional lain-lain 		<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan teknologi dan pengetahuan pertanian kepada petani 	<ul style="list-style-type: none"> Penjualan produk Agradaya baik skema b2b maupun b2c Workshop Tourism

Gambar 2.2 *Social Business Model Canvas* pada Agradaya

Kanvas Program Sosial (*Social Program Canvas*) merupakan sebuah alat (*tool*) dalam strategi pengembangan dan perencanaan untuk menerjemahkan

konsep/ide, penerima manfaat, infrastruktur maupun sumber-sumber dalam bentuk elemen-elemen *visual*. Konsep Kanvas Program Sosial (*Social Program Canvas*) mengandalkan gambar-gambar ide sehingga setiap orang memiliki pemahaman yang serupa dan nyata terhadap program yang bisa dilakukan, sistem kerja, *output*, biaya dan sebagainya.

Model Perencanaan Kanvas Program Sosial (*Social Program Canvas*) digunakan dengan metode diskusi antara seluruh elemen lembaga. Poin-poin yang menjadi konsep/ide/gagasan/usulan kemudian dituliskan dalam *metacard/sticky notes* dan ditempelkan pada kanvas. Fasilitator dan peserta dapat memulainya dari kolom mana saja, tergantung dari kolom mana yang sudah terlebih dahulu terisi, dapat diawali dari potensi awal mana saja yang sudah dimiliki oleh lembaga. Selanjutnya para peserta berdiskusi menyepakati mana-mana saja yang lebih prioritas dan dapat dilaksanakan dalam waktu dekat. Model ini berisi sebelas blok/kolom yang harus diisi oleh Tim, blok/kolom tersebut terdiri dari:

1. Blok legalitas & dasar hukum (*legality*), merupakan sebuah dasar dalam pelaksanaan program pemberdayaan yang akan dilakukan;
2. Blok penerima manfaat (*beneficiaries*), menggambarkan individu, kelompok, masyarakat yang menjadi target yang akan dijangkau
3. Blok tahapan pelaksanaan (*implementation*) yaitu aktivitas utama yang terkait dengan kegiatan;
4. Blok nilai, tujuan dan manfaat program (*values*), merupakan hal yang berharga, yang dapat dimaknai sebagai ruh dalam pelaksanaan program;

5. Kolom hubungan dengan penerima manfaat (*relation*) yaitu suatu cara yang dilakukan untuk menjangkau dan membangun hubungan dengan *beneficiaries*;
6. Kolom potensi penerima manfaat (*potency*) adalah sumber daya utama yang dimiliki masyarakat dalam pelaksanaan program;
7. Kolom mitra dan sumber (*source*), yaitu mitra kerja dan sumber lainnya yang dapat dimanfaatkan;
8. Kolom struktur biaya / kebutuhan (*cost*), yaitu biaya – biaya yang dikeluarkan untuk mendukung semua aktivitas – aktivitas dalam program;
9. Kolom pendanaan (*funding*), yang berisi tentang sumber pendanaan;
10. Kolom dampak negatif yang berkurang (*negative impact*), yaitu masalah apa yang akan hilang/berkurang setelah pelaksanaan kegiatan/program;
11. Kolom dampak positif yang bertambah (*positive impact*), yaitu budaya/kebiasaan positif apa yang akan meningkat setelah program/kegiatan dilakukan.

2.2.4 Kajian tentang Wanita Tuna Susila

Kehidupan manusia sebagai makhluk sosial selalu dihadapkan kepada masalah sosial yang tidak dapat dipisahkan adalah kehidupan. Masalah sosial ini timbul sebagai akibat dari hubungannya dengan sesama manusia lainnya dan akibat tingkah lakunya. Masalah sosial tidaklah serupa antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya karena adanya perbedaan dalam tingkat perkembangan kebudayaannya, serta sifat kependudukannya, dan keadaan lingkungan alamnya. Hal ini yang membedakan masalah sosial dengan masalah

lainnya adalah bahwa masalah sosial selalu ada kaitannya yang dekat dengan nilai-nilai moral dan pranata-pranata sosial, serta ada kaitannya dengan hubungan-hubungan manusia itu terwujud.

Istilah Wanita Tuna Susila (WTS) di dalam masyarakat dikenal juga dengan sebutan pelacur, Pekerja Seks Komersial (PSK), lonte, kupu-kupu malam, sampah masyarakat, perempuan nakal dan lain sebagainya. Penggunaan WTS sebagai istilah resmi bagi pelacur perempuan, merupakan upaya pemerintah untuk memperhalus istilah pelacuran. Sedangkan, pelacur laki-laki disebut gigolo

Kartono (2015) menyampaikan bahwa “Wanita Tuna Susila berasal dari bahasa latin yaitu *Pro-situere* dan *pro-stauree*, yang berarti memberikan diri berbuat zina, melakukan persundelan, percabulan. Sedang prostitusi adalah pelacur atau sundel”. Eks Pekerja Seks Komersial merupakan mantan PSK, dalam hal ini yaitu para mantan PSK yang mendapatkan layanan dan rehabilitas sosial, dimana batasan usianya berada pada masa remaja. Batasan usia remaja yang umum digunakan oleh para ahli adalah antara 12-21 tahun. rentang usia remaja ini biasanya dibedakan menjadi tiga yaitu remaja awal 12-15 tahun, remaja pertengahan 15-18 tahun, dan remaja akhir 18-21 tahun.”

Pelaku prostitusi atau WTS adalah satu dari sekian bentuk penyakit masyarakat yang harusnya tidak dibiarkan penyebarannya, karena dapat merusak berbagai aspek kehidupan. Tuna susila didefinisikan sebagai perilaku yang kurang baik, karena kemudahan dalam memberikan pelampiasan hasrat seksual dengan relasi dan diberikan imbalan materi atau jasa atas pelayanannya. Kegiatan

prostitusi dilakukan wanita pekerja seks komersial yang menjual diri kepada seseorang untuk memuaskan nafsu seks dan mendapatkan imbalan.

Kartono (2015) menyampaikan bahwa “Wanita tuna susila atau wanita pelacur adalah wanita yang menjual tubuhnya untuk memuaskan seksual laki-laki siapapun yang menginginkannya, dimana wanita tersebut menerima sejumlah uang atau barang yang umumnya dengan uang dari laki-laki pemakainya”. Jenis Wanita Tuna Susila (WTS) dapat dibagi menurut aktifitasnya yang terorganisasi dan tidak terorganisasi dari jenis inilah dapat dilihat perbedaan yang jelas dari kedua jenis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Wanita Tuna Susila yang terorganisasi, termasuk di dalamnya a) yang bekerja di lokasi WTS, panti pijat plus-plus dan tempat-tempat yang mengusahakan wanita panggilan, b) Aktifitasnya tergantung pada mucikari, penjaga keamanan atau agen lainnya yang membantu mereka untuk menghubungkan dengan calon pelanggan serta melindungi dalam kondisi bahaya, c) Berbagi hasil dengan mediator.
2. Wanita Tuna Susila Tidak terorganisasi, a) Wanita Tuna Susila mencari pelanggan sendiri tanpa melalui mediator, langsung transaksi dengan pelanggannya termasuk di dalamnya Wanita jalanan, perempuan lainnya yang beroperasi secara gelap ditempat umum, dan sebagainya. b) Tempat : mall, diskotik, dan sebagainya. (Kartono, 2015, hal. 205)

Salah satu faktor yang membuat wanita menjadi seorang tuna susila adalah untuk menghindarkan diri dari kesulitan hidup, dan mendapatkan kesenangan melalui jalan pendek. Faktor lainnya adalah kurangnya pengertian, pendidikan, dan buta huruf, sehingga menghalalkan pelacuran. Secara umum Kurangnya lapangan pekerjaan membuat sebagian wanita menjadikan harga dirinya sebagai modal untuk mendapatkan uang. Namun selain itu juga ada faktor-faktor lain yang menyebabkan wanita tuna susila ini melakukan aktivitas prostitusi. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Faktor Ekonomi Masalah ekonomi menjadi salah satu faktor yang membuat WTS melakukan pekerjaan tersebut, di tengah era teknologi maju di mana harga-harga melambung tinggi WTS mengakui bahwa pekerjaan tersebut menjadi jalan keluar yang cepat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarga.
- b. Faktor keluarga Faktor lain yang menyebabkan seseorang menjadi WTS dikarenakan kabur dari rumah akibat ketegangan yang didapatkan di rumah yang berantakan dan kurangnya perhatian orang tua sehingga merasa frustrasi.
- c. Faktor Sosial Kondisi sosial, lingkungan dapat terpengaruh untuk memilih pekerjaan WTS, ini biasanya terjadi pada wanita yang mempunyai hubungan emosional teman terhadap WTS, sehingga mereka mendapat bujukan dan ajakan menjadi WTS.
- d. Faktor Psikologis Kejiwaan seseorang dapat berpengaruh terhadap tindakan dan perbuatan yang dilakukan, kecanduan ingin memperoleh hasrat seks membuat seseorang memilih WTS sebagai solusi untuk memuaskan batin, karena selain pemenuh kebutuhan rohani kebutuhan jasmani pun terpenuhi ini terjadi pada mereka yang menjadi janda pada usia muda.
- e. Faktor pendidikan Pendidikan merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan karena pendidikan sangat berpengaruh dalam menentukan pekerjaan. Rendahnya pendidikan atau pengetahuan membuat seseorang susah mendapatkan pekerjaan. (Soedjono, 2013, hal. 13)

2.2.5 Kajian tentang Praktik Pekerjaan Sosial dengan Wanita Tuna Susila

Siporin dalam Fahrudin (2012) menyebutkan bahwa “Pekerjaan sosial adalah metode kelembagaan sosial untuk membantu orang mencegah dan memecahkan masalah-masalah sosial mereka.” Pekerjaan sosial khususnya pada *setting* wanita tuna susila berusaha meningkatkan keberfungsian sosial mereka, secara sendiri atau kelompok dengan kegiatan-kegiatan yang dipusatkan pada hubungan sosial yang merupakan interaksi antara orang lain dan lingkungannya.

Zastrow dalam Fahrudin (2012) mengatakan bahwa “Pekerjaan sosial secara umum adalah kegiatan profesional membantu individu, kelompok, atau masyarakat untuk meningkatkan atau memulihkan kemampuan mereka berfungsi

sosial.” Sebagai upaya untuk menciptakan kondisi sosial yang mendukung tujuan-tujuan ini. Pekerjaan sosial mempunyai posisi pokok dan sejumlah fungsi dasar yang merupakan tugas-tugas kemasyarakatan.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa pekerjaan sosial dalam *setting* wanita tuna susila, yang akan dibahas dalam penelitian ini merupakan suatu bidang profesi pertolongan sosial profesional yang berfokus dan bertujuan untuk membantu atau menolong eks wanita tuna susila yang menjadi penerima manfaat pada lembaga dalam mengatasi masalah-masalah sehingga mampu mencapai keberfungsian sosial.

Pekerjaan sosial berusaha untuk memperkuat keberfungsian orang dan meningkatkan efektivitas lembaga-lembaga dalam masyarakat yang menyediakan sumber-sumber serta kesempatan bagi warganya.

Tujuan pekerjaan sosial menurut ada empat, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan-kemampuan orang untuk memecahkan masalah, mengatasi (*coping*), perkembangan.
2. Menghubungkan orang dengan sistem-sistem yang memberikan kepada mereka sumber-sumber, pelayanan-pelayanan, dan kesempatan-kesempatan.
3. Memperbaiki keefektifan dan bekerjanya secara manusiawi dari sistem-sistem yang menyediakan orang dengan sumber dan pelayanan.
4. Mengembangkan dan memperbaiki kebijakan sosial. *National Association of Social Workers (NASW)* dalam (Fahrudin, 2012, hal. 66-67)

Berdasarkan keempat tujuan pekerjaan sosial di atas, pekerja sosial dapat meningkatkan kemampuan wanita tuna susila mengembangkan teknik-teknik untuk memecahkan masalah yang dialaminya. Pekerja sosial dapat menghubungkan penerima manfaat dengan sistem sumber pertolongan yang

berpotensi dapat membantu memecahkan masalah, bekerjasama dengan lembaga dalam memperbaiki keefektikan pelayanan dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Pekerja sosial perlu memberikan pengaruh terhadap anak penerima manfaat melalui berbagai program dan kegiatan. Selain itu, pekerja sosial juga perlu mengembangkan dan menghadirkan berbagai inovasi untuk meningkatkan kualitas layanan sesuai dengan kebutuhan yang mereka perlukan.

Dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2009 mengenai Kesejahteraan Sosial mengatur mengenai rehabilitasi sosial, adapun pengertian rehabilitasi sosial menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2009 pasal 7 ayat 2 yaitu memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial yang dimaksud Undang-Undang No.11 Tahun 2009 dalam ayat 1 yaitu dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial. Dalam ayat 2 juga menjelaskan bentuk-bentuk rehabilitasi sosial yaitu motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan dan pengasuhan, pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling psikososial, pelayanan aksesibilitas, bantuan dan asistensi sosial, bimbingan resosialisasi, bimbingan lanjut dan rujukan.

Menurut Permensos No. 20 tahun 2018 tentang Standarisasi pelayanan rehabilitasi yang harus dimiliki setiap panti sosial, yaitu:

1. Tahap pendekatan awal, pada tahap ini kegiatan yang dilakukan yaitu melakukan sosialisasi program, penjangkauan tau penjangkauan calon klien, seleksi calon klien, penerimaan dan registrasi serta konferensi kasus;

2. Tahap pengungkapan dan pemahaman masalah, Tahap ini berisi kegiatan analisis kondisi klien, keluarga, lingkungan, karakteristik masalah, sebab dan implikasi masalah, kapasitas mengatasi masalah dan sumber daya, serta konferensi kasus;
3. Tahap perencanaan program pelayanan, Tahap ini berisi kegiatan penetapan tujuan pelayanan, penetapan jenis pelayanan yang dibutuhkan klien dan sumber daya yang akan digunakan;
4. Tahap pelaksanaan pelayanan, Tahap ini berisi beberapa kegiatan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan permasalahan klien, antara lain:
 - a. Bimbingan fisik dan kesehatan
 - 1) Pemeliharaan fisik dan kesehatan
 - 2) Terapi fisik
 - 3) Pemeliharaan kebugaran
 - 4) Pelayanan menu dalam rangka peningkatan gizi
 - 5) Orientasi mobilitas
 - b. Bimbingan mental dan psikologi
 - 1) Bimbingan *Daily Living Activity*
 - 2) Bimbingan relasi sosial
 - 3) Bimbingan integrasi sosial
 - 4) Bimbingan rekreasi
 - c. Bimbingan pelatihan keterampilan
 - 1) Bimbingan usaha ekonomi produktif

- 2) Bimbingan keterampilan kerja
 - 3) Bimbingan pengelolaan usaha
 - 4) Bimbingan wirausaha
 - 5) Bimbingan kesenian
- d. Bimbingan pendidikan
- 1) Bimbingan paket belajar klien
 - 2) Bimbingan beasiswa
 - 3) Bantuan pendidikan
- e. Bimbingan individu (pelayanan konseling individu, dan pelayanan terapi sosial)
- f. Bimbingan kelompok (dinamika kelompok dan pelayanan konseling kelompok)
- g. Penyiapan lingkungan sosial
- 1) Penyiapan lingkungan keluarga
 - 2) Penyiapan lingkungan sekitar kehidupan klien
 - 3) Penyiapan lingkungan sosial klien secara luas
 - 4) Tahap pasca pelayanan rehabilitasi sosial

Pada tahap ini bentuk kegiatan pasca pelayanan meliputi:

1. Penghentian pelayanan, penghentian pelayanan dilakukan pada saat klien sudah selesai mengikuti semua kegiatan rehabilitasi dan telah mencapai pelayanan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Rujukan, kegiatan ini dilakukan jika klien membutuhkan pelayanan lainnya yang tidak tersedia di panti sosial.

3. Pemulangan dan penyaluran, kegiatan ini dilakukan setelah klien dinyatakan selesai menjalankan rehabilitasi yang kemudian dipulangkan ke tempat asal.
4. Pembinaan lanjut, bimbingan lanjut merupakan kegiatan memantau perkembangan eks klien, keluarga, dan masyarakat guna lebih dapat memantapkan, meningkatkan dan mengembangkan kemandirian eks klien dalam kehidupan dan penghidupan yang layak. Kegiatan ini bertujuan mengawasi dan memantau klien yang telah keluar dari panti. Jadi klien yang sudah menyelesaikan masa rehabilitasinya tetap dipantau.

2.2.6 Kerangka Kerja Rekayasa Teknologi dalam Manajemen Organisasi

Teknologi adalah sarana teknis termasuk cara-cara operasional atau alat sistematis yang dibuat dengan menerapkan ilmu pengetahuan untuk mempermudah pekerjaan dan memberi hasil yang lebih baik. Galbraith dalam Newby (2000) teknologi adalah aplikasi sistematis dari pengetahuan ilmiah atau pengetahuan terorganisir lainnya untuk tugas-tugas praktis. Teknologi secara umum diartikan sebagai sebuah cabang pengetahuan yang berhubungan dengan penciptaan dan penggunaan sarana teknis dan keterkaitannya dengan kehidupan masyarakat dan lingkungan. Definisi-definisi tersebut hakikatnya mengartikan teknologi sebagai penerapan ilmu pengetahuan untuk kepentingan kemudahan pelaksanaan tugas-tugas praktis kehidupan manusia.

Hasenfeld (1992) menyampaikan bahwa “Teknologi dalam manajemen organisasi menunjuk pada sarana teknis termasuk cara-cara operasional atau alat sistematis yang dibuat dengan menerapkan ilmu pengetahuan untuk

mempermudah tugas-tugas manajemen organisasi.” Pada konteks organisasi pelayanan kemanusiaan, organisasi dioperasikan untuk memproses orang, mendukung keberlangsungan orang, dan perubahan orang. Layanan tersebut dijalankan baik secara perorangan maupun kolektif. Untuk menghasilkan layanan tersebut perlu manajemen. Dengan demikian teknologi yang dijalankan dalam organisasi pelayanan kemanusiaan dapat terkait dengan teknologi dalam manajemen dan teknologi dalam pelayanan yang diberikan. Sesuai dengan topik sesi perkuliahan ini, pembahasan teknologi dalam sesi ini dibatasi pada teknologi dalam konteks manajemennya.

Pujileksono (2021) Menyampaikan bahwa “Teknologi dibuat dan dikembangkan secara terus menerus sesuai dengan perkembangan kehidupan. Proses membuat, memodifikasi atau mengembangkan teknologi tersebut disebut dengan rekayasa teknologi. Rekayasa teknologi adalah proses untuk menciptakan atau memodifikasi teknologi yang merupakan aplikasi praktis ilmu pengetahuan untuk meningkatkan fungsi yang ada dan memecahkan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari.”

Ruang lingkup rekayasa teknologi manajemen organisasi pelayanan kemanusiaan dibatasi untuk konteks memecahkan masalah yang mempermudah praktik organisasi dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen sehingga organisasi tersebut dapat mencapai tujuan secara efektif, efisien, dan dalam relasi kerja yang sehat. Tentu saja arena penerapan ilmu pengetahuan dalam merekayasa teknologi ini sejalan dengan referensi ilmu pengetahuan tentang fungsi manajemen organisasi.

Gullick dalam Siagian (2014) menyampaikan bahwa “Fungsi manajemen organisasi terdiri dari: *planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting,* dan *budgeting*. Rekayasa teknologi manajemen organisasi dapat dilaksanakan pada tingkatan model yang menawarkan opsi rangkaian fungsi manajemen organisasi yang dianggap lebih memudahkan mengelola organisasi untuk mencapai tujuan. Rekayasa teknologi juga dapat menawarkan opsi metode atau teknik dalam menjalankan setiap fungsi manajemen, atau menawarkan perbaikan prosedurnya.”

Kerangka kerja rekayasa teknologi dalam manajemen organisasi pelayanan kemanusiaan tersebut diawali dengan proses penemuan dan perumusan masalah dalam praktik manajemen organisasi yang belum dapat diatasi oleh teknologi yang ada sebelumnya. Perumusan masalah tersebut dapat saja difokuskan pada fungsi manajemen tertentu. Proses tersebut harus dilakukan melalui penggalian data tentang praktik-praktik manajemen organisasi baik secara langsung maupun melalui kajian data sekunder dengan cara-cara yang menjamin keabsahan data. Data yang diperoleh diolah, diulas, dikaitkan dengan hasil kajian literatur untuk menghasilkan analisis data yang secara cermat, menyeluruh, tajam, dan tepat dalam merumuskan kesimpulan tentang masalah manajemen, kelemahan teknologi sebelumnya dalam pelaksanaan manajemen tersebut, konsekuensinya, serta kebutuhan rekayasa teknologi. Langkah selanjutnya, merancang modifikasi atau pengembangan atas teknologi lama atau penciptaan teknologi baru berdasarkan ilmu pengetahuan.

Rekayasa teknologi tersebut dikembangkan berdasarkan asumsi-asumsi dari teori-teori manajemen organisasi yang kemudian dirumuskan dalam rancangan kerja yang praktis. Rancangan tersebut kemudian diuji untuk menjamin desainnya logis, dapat diterapkan secara praktis, dan meyakinkan adanya penambahan nilai fungsi teknologi tersebut dalam penyelesaian masalah manajemen organisasi tersebut. Pengujian teknologi dilakukan secara subjektif dengan menimbang penilaian para ahli dan praktisi yang akan menjadi pengguna, maupun secara objektif dengan uji coba implementasi teknologi tersebut.

Kerangka kerja rekayasa teknologi tersebut dibatasi oleh prinsip-prinsip etik yang menjadi pengendali, apa yang harus dan tidak boleh dilakukan dalam melaksanakan proses rekayasa tersebut. Pada dasarnya kegiatan rekayasa teknologi terikat pada prinsip-prinsip etik penelitian. Seperti dilakukan secara bertanggung jawab, dalam kegiatan yang legal, kebenaran dalam rekayasa teknologi divalidasi, dilakukan dengan jujur, berkeadilan, menghargai martabat partisipan dengan tanpa memaksa, menghargai kesediaan, tidak diskriminasi, dan menjaga prinsip kerahasiaan identitas dalam publikasi, melaksanakan kajian dengan cermat dan sungguh-sungguh, menghargai pemikiran orang lain, terbuka terhadap kritik, publikasi hanya sekali. Sejalan dengan kode etik pekerja sosial dalam tanggung jawab untuk mengembangkan profesi, mengupayakan proses dan hasil rekayasa teknologi yang berkualitas.

